



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KPKNL
JAKARTA I

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KPKNL JAKARTA I



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN-1

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi-1

B. Peran Strategis-6

C. Sistematika Laporan-7

BAB II PERENCANAAN KINERJA-8

A. Penetapan/Perjanjian Kinerja-8

B. Pengukuran Kinerja-9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA-10

A. Capaian Kinerja Organisasi-10

B. Realisasi Anggaran-24

C. Capaian Pengembangan Kompetensi Pegawai
Tahun 2022-24

BAB IV PENUTUP-25

Lampiran:

- **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- **Struktur Organisasi**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Jakarta I pada Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada pengguna jasa.

Laporan Kinerja disusun untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Jakarta I telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen manajemen kinerja. Performa KPKNL Jakarta I dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 ini adalah berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Jakarta I Tahun 2022 sebesar 114,83%.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPKNL Jakarta I dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kepala Kantor,

Widyan Ahmad Fananto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2022 merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN menuju *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2022 merupakan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian visi yang berpegang teguh pada visi DJKN yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta I mempunyai 5 misi yaitu:


1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously Improved*). Pada tahun 2022 terdapat 11 (sebelas) Sasaran Program/ Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta. Secara umum pencapaian IKU pada Tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) IKU yang berada di bawah target. IKU yang belum mencapai target yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

KPKNL Jakarta I tidak akan berpuas diri dengan hasil yang telah diraih di Tahun 2022. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan rencana aksi yang relevan. KPKNL Jakarta I akan terus bekerja dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempumaan, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Kepala Kantor,

Wildan Ahmad Fananto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMKM.01/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMKM.01/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara susunan organisasi KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Kepala Kantor: **Wildan Ahmad Fananto**

Kasubbag Umum: **Warsudin**

Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara: **Gunawan Hartanto**

Kasi Piutang Negara: **Iraningsih**

Kasi Hukum dan Informasi: **Basri**

Kasi Kepatuhan Internal: **Linda Susanti**

dan Para Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta I per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 41 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
S3	-	-	-	-	-
S2	-	-	4	5	9
S1/D IV	-	3	21	-	24
D III	-	4	2	-	6
SLTA/D I	-	-	2	-	2
SLTP	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7	29	5	45

2. Berdasarkan Gender

JENIS KELAMIN	Golongan				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	3	16	3	22
Laki-laki	-	4	13	2	19
TOTAL	-	7	29	5	41

3. Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Fungsional Pelelang	5
2	Fungsional Penilai Pemerintah	5
3	Fungsional Pranata Keuangan	1
3	Juru Sita	1
4	Pejabat Lelang	2
5	Penilai	2
6	Pemeriksa	1

Tugas dan fungsi KPKNL Jakarta I berdasarkan Perdirjen Kekayaan Negara No. 187/KN/2012 di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian Barang Milik Negara (BMN) kepada pengguna jasa yang berada di wilayah kerja KPKNL Jakarta I, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara:

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/ Lembaga Negara/ Badan atau Komisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Komisi Pemilihan Umum dan Ombudsman Republik Indonesia.

- b. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Pusat, Hak atas kekayaan intelektual,

Benda Cagar Budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai BMN dan Aset eks. Bank Dalam Likuidasi.

- c. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Pusat

2. Pelayanan Penilaian

- a. Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:

Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lainlain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta I, Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta I, Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara LainLain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta I yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta

- b. Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Pusat atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:

Sumber Daya Alam, Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara, Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah, Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya, Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara, Sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurat Militer dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara

- a. Pengurusan dan pengelolaan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Penyerah Piutang:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3)Kementerian Sekretariat Negara 4)Kementerian Luar Negeri 5) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 6) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 7) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 8) Badan Intelijen Negara 9) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 10) Badan Pusat Statistik 11) Badan Standardisasi Nasional 12) Badan Siber dan Sandi Negara 13) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 14) Komisi Pemilihan Umum 15) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 16) Lembaga Administrasi Negara 17) Badan Riset dan Inovasi Nasional 18) Ombudsman Republik Indonesia 19)

DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) eks.penanganan Kejaksaan) 20) Aset kredit eks BPPN yang berasal dari: Bank Surya, Bank Hokindo, Bank Subentra, Bank Umum Nasional, Bank Danamon Indonesia, Bank Bali, Bank Risjad Salim Internasional, Bank PDFCI, Bank Niaga, Bank Pos Nusantara, Bank Sewu International, Bank Sanho, Bank Dharmala, Bank Ciputra, Bank Indonesia Raya, Bank Danahutama, Bank Central Dagang, Bank Budi International, Bank Orient, Bank Sahid Gajah Perkasa, Bank Dana Asia, Bank Yakin Makmur, Bank Namura Internusa, Bank Tata, Bank Pesona Kridayana, Bank Putra Surya Perkasa, Bank Mashill Utama, Bank Baja International, Bank Bumi Raya Utama, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Universal, Bank Jaya International, Bank Pemiagaan Umum, Bank Pertiwi, Bank Overseas Express, Bank Permata, Bank Prima Ekspres, 21) Pemda DKI Jakarta.

4. Pelayanan Lelang

a. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:

- 1) Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta I
- 2) Balai Lelang
- 3) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
- 4) Eksekusi Pajak Lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat
- 5) Eksekusi Pajak Lingkup Kanwil DJP WP Besar
- 6) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Jakarta Pusat
- 7) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur: a) PT. Bank Mandiri b) PT. Bank Syariah Indonesia c) Standard Chartered Bank d) Bank Perkreditan Rakyat e) Bank Perkreditan Rakyat Syariah f) PT. Bank OCBC NISP
- 8) Eksekusi Jaminan Fidusia domisili Kreditur di Jakarta Pusat
- 9) Kementerian/Lembaga Negara, Badan Layanan Umum, dan Pemohon Lelang lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta I
- 10) Aset Bank Indonesia
- 11) Pemerintah Daerah domisili di Jakarta Pusat
- 12) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Jakarta Pusat
- 13) Balai Harta Peninggalan
- 14) Sukarela domisili Pemohon di Jakarta Pusat
- 15) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi domisili di Jakarta Pusat
- 16) Aset eks. BPPN/PT. PPA domisili di Jakarta Pusat
- 17) Aset eks. settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Pusat
- 18) Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta

B. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta I memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan kekayaan negara;

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta I turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta I selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara;

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, pengurusan piutang negara difokuskan kepada piutang negara instansi pemerintah.

3. Memberikan pelayanan lelang;

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. KPKNL Jakarta I tidak hanya melaksanakan lelang eksekusi tetapi juga melaksanakan lelang sukarela. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *Akta Van Transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta I diharapkan dapat berperan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap ke dalam pola pikir masyarakat, bahwa lelang adalah instrumen jual beli yang menguntungkan, sehingga berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan kontribusi pemasukan PNBP ke Kas Negara

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Bea Lelang Pegadaian. Kedua penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan penetapan/perjanjian kinerja dan metode yang digunakan dalam mengukur kinerja tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

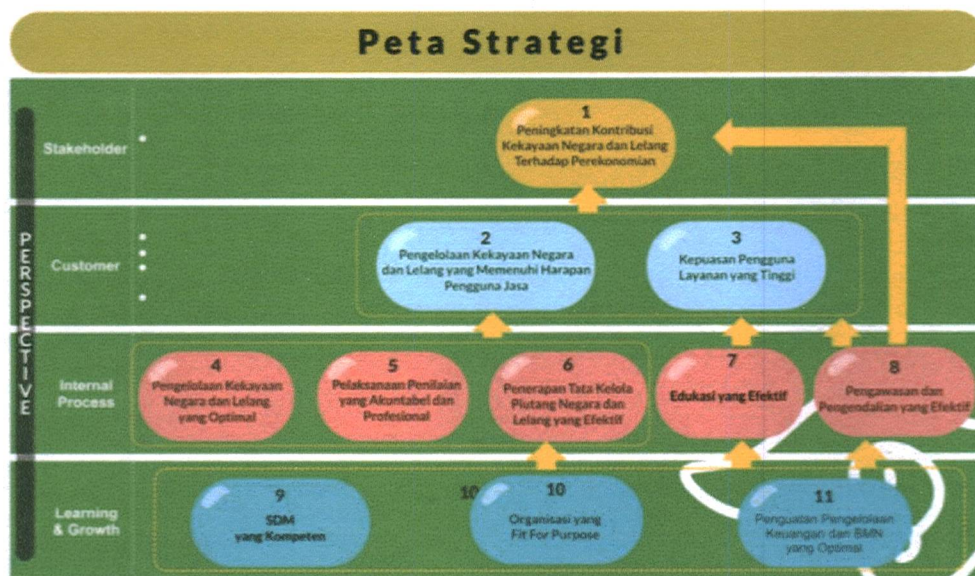
A. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal, visi dan misi KPKNL Jakarta I menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor 7/KN.19/2022.

Sasaran Strategis KPKNL Jakarta I Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta I. Peta Strategi KPKNL Jakarta I Tahun 2022 memuat 11 Sasaran Program/Kegiatan yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (4) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (7) Edukasi yang Efektif; (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (9) SDM yang Kompeten; (10) Organisasi yang Fit For Purpose; (11) Penguatan Pengelolaan Keuangan.

Peta strategi KPKNL Jakarta I mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Jakarta I tahun 2022 tersebut untuk mencapai 11 Sasaran Program/Kegiatan telah diidentifikasi sebanyak 19 Indikator Kinerja.



B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, KPKNL Jakarta I berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lain;
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rincian capaian kinerja atas 11 (sebelas) Sasaran Program/ Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja (IKU) KPKNL Jakarta I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SS 1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	100% (Rp17.085.628.001)	100% (Rp82.114.405.721)	100% (Rp46.595.194.894,02)
Realisasi	115,87% (Rp20.952.271.152)	105,80% (Rp106.958.949.890)	179,41% (Rp83.596.300.898)
Persentase capaian	115,87%	105,80%	179,41%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	100% (Rp80.035.000.000)	100% (Rp89.122.000.000 kemudian terdapat adendum sehingga target menjadi Rp91.622.000.000)
Realisasi	147,73% (Rp118.231.592.390)	196,80% (Rp180.314.391.844,50)
Persentase capaian	147,73%	196,80%

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp180.314.391.844,50. IKU ini mulai diukur kinerjanya pada tahun 2017. Realisasi tersebut didapat dari :

1. Realisasi nominal PNBPN Aset sebesar Rp111.140.999.143,00
2. Realisasi nominal PNBPN PN sebesar Rp44.167.226.124,50
3. Realisasi nominal PNBPN Lelang sebesar Rp25.006.166.577,00

2. Persentase produktifitas lelang

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	30%	32%	34%
Realisasi	39,12%	36,43%	37,43%
Persentase capaian	120%	113,85%	110,08%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	35%	36%
Realisasi	39,41%	45,47%
Persentase capaian	112,61%	126,31%

Realisasi IKU Presentase produktifitas lelang pada tahun 2022 adalah sebesar 45,47%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 36%. Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku, yaitu dengan membandingkan jumlah frekuensi lelang yang laku (502 lot) dengan jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan (1.104 lot) pada tahun 2022.

SS 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

3. Persentase Realisasi Pokok Lelang

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	105,67%	77,06%	121,43%
Persentase capaian	105,67%	77,06%	121,43%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	100%	100%
Realisasi	121,95%	148,52%
Persentase capaian	121,95%	148,52

Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) pada tahun 2022 adalah 148,52%. Pencapaian tersebut lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) merupakan gabungan dari Target/realisasi pokok lelang kelas I dan Target/realisasi pokok lelang pegadaian.

Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2022 menggunakan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP) + Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP) + Pegadaian}}$$

Adapun rincian pencapaian sub-sub IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pokok Lelang Kelas I

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	n/a	Rp359.717.000.000	Rp360.000.000.000
Realisasi	n/a	Rp277.987.285.678	Rp483.308.581.132
Persentas eapaian	-	77,28%	134%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	Rp383.000.000.000	Rp388.000.000.000
Realisasi	Rp416.604.964.000	Rp576.539.889.492
Persentase capaian	109%	148,59%

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Kelas I pada tahun 2022 adalah sebesar Rp576.539.889.492 atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp388.000.000.000.

b. Jumlah Pokok Lelang Pegadaian.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	n/a	Rp128.450.000.000	Rp98.200.000.000
Realisasi	n/a	Rp98.189.732.400	Rp73.089.188.300
Persentase capaian	-	76,44%	74%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	Rp94.000.000.000	Rp80.000.000.000
Realisasi	Rp165.080.089.000	Rp118.551.458.600
Persentase capaian	176%	148,19%

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Pegadaian pada tahun 2022 adalah sebesar Rp118.551.458.600. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp80.000.000.000.

4. Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara

IKU Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara baru diukur di tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. Realisasi Persentase Hasil

Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2019 merupakan gabungan dari Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan dan Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	Rp25.500.000.000	Rp25.500.000.000	Rp241.655.058.525 (3% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sd 31Desember 2016
Realisasi	Rp1.714.415.981	Rp8.865.516.436,17	Rp167.069.926.416 (2,07% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sd 31 Desember 2016
Persentase capaian	6,72%	34,77%	69%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	Rp261.983.673.163,57	Rp341.159.212.641,00 kemudian terdapat addendum sehingga target menjadi Rp512.000.000.000,00
Realisasi	Rp485.564.042.443,12	Rp 698.862.787.052,95
Persentase capaian	185,34%	136,50%

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

SS 3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	4,36	4,51	4,62
Realisasi	4,51	4,62	4,77
Persentase capaian	Tahun 2018	102,44%	103,25%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	4,64	4,65
Realisasi	4,82	4,89
Persentase capaian	103,88%	105,16%

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2022 adalah sebesar 4,89. Pencapaian tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,65. Rincian nilai masing-masing layanan adalah sebagai berikut :

No.	Layanan	Total Indeks
1	Pengelolaan Kekayaan Negara	4.90
2	Piutang Negara	4.98
3	Pelayanan Penilaian	4.88
4	Pelayanan Lelang	4.80
Indeks Kepuasan		4.89

SS 4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	-	-	100% (99 NUP)
Realisasi	-	-	100% (99 NUP)
Persentase capaian	-	-	100%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	62% (273 NUP)	65% (464 NUP)
Realisasi	78,86% (274 NUP)	83,63% (464 NUP)
Persentase capaian	127,2%	128,7%

IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mulai diukur kinerjanya padatahun 2020. Formula penghitungan IKU ini di tahun 2022 masih sama dengan formula tahun lalu, yaitu melingkupi perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan optimalisasi SBSK.

Realisasi IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2022 adalah sebesar 128,7%. Jika dilihat dari jumlah NUP BMN yang menjadi target, KPKNL Jakarta I berhasil menyelesaikan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK atas 274 NUP dari target 274 NUP.

7. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikasi.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	100%	100%	0
Realisasi	200%	100%	0
Persentase capaian	120%	100%	-

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	100%	100%
Realisasi	45,45%	100%
Persentase capaian	45,45%	100%

Berbeda dengan pengukuran IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikasi tahun 2021, ruang lingkup pengukuran IKU ini di tahun 2022 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dan penuntasan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (dengan mekanisme penggantian nama). Untuk penyelesaian pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat, dapat terealisasi 134 sertipikat dari target 284 sertipikat atau tercapai sebesar 47,18%. Untuk penyelesaian penuntasan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan, dapat terealisasi 584 sertipikat dari target 434 sertipikat atau tercapai sebesar 134,56%.

8. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	85 BKPN	10 BKPN	33 BKPN
Realisasi	89 BKPN	33 BKPN	31 BKPN (nilai menjadi 34,5 dengan pembobotan)
Persentase capaian	104,71%	330%	104,55%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	33 BKPN	40 BKPN
Realisasi	71 BKPN	75 BKPN
Persentase capaian	215,15%	187, 50%

IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN baru mulai diukur pada tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. Realisasi Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2019 merupakan gabungan dari Jumlah Piutang Negara yang DapatDiselesaikan dan Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan. IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Realisasi Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan (Lunas, Ditarik, PSDBT, Dikembalikan) pada tahun 2022 sebesar 75 BKPN dari target 40 BKPN. Persentase capaian mencapai 187,50%.

9. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	-	-	100% (98 NUP)
Realisasi	-	-	100% (134 NUP)
Persentase capaian	-	-	136,73%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	100% (157 NUP)	100%
Realisasi	103,82% (163 NUP)	102,29%
Persentase capaian	103,82%	102,29%

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) baru mulai diukur pada tahun 2020. Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Berbeda dengan pengukuran IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2021, selain mengevaluasi kinerja aset, pada tahun 2022 juga dilaksanakan penyusunan dan penyampaian rekomendasi aset.

Realisasi IKU implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2022 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Untuk evaluasi kinerja aset, dapat terealisasi evaluasi kinerja atas 52 aset dari target 50 aset;
2. Untuk Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi, dapat terealisasi 349 dari target 347 jumlah aset yang disusun dan disampaikan rekomendasinya.

SS 5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**10. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	-	-	30%
Realisasi	-	-	4,21%
Persentase capaian	-	-	185,98%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	22%	19%
Realisasi	1,90%	4,35%
Persentase capaian	191,36%	177,11%

IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian baru mulai diukur pada tahun 2020. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2022 adalah sebesar 4,35% dari target 19% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan semakin bagus).

SS 6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**11. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction***

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	85%	90%	90%
Realisasi	94.02%	99.49%	100%
Persentase capaian	110,61%	110,54%	111,11%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	92%	92%
Realisasi	100%	100%
Persentase capaian	108,70%	108,70%

Realisasi IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction 2022 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92%. Produktivitas lelang dinilai dari berapa intensitas frekuensi lelang yang dilaksanakan secara *e-auction* maupun *e-conventional auction*. Dalam hal ini lelang di KPKNL Jakarta I telah dilaksanakan secara *e-auction* seluruhnya.

12. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	-	-	-
Realisasi	-	-	-
Persentase capaian	-	-	-

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	12,50%	10,00%
Realisasi	0,00%	0,00%
Persentase capaian	200,00%	200,00%

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN merupakan IKU baru di tahun 2021. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Realisasi Data PNBP Fungsional DJKN pada tahun 2021 adalah sebesar 0,00% dari target 10,00% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan

semakin bagus) atau tidak ada deviasi data PNBPFungsional DJKN di KPKNL Jakarta I.

SS 7 Edukasi yang efektif

13. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	88	90	93
Realisasi	90	93	94,15
Persentase capaian	102,27%	103,33%	101,24%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	93	93
Realisasi	94,15	96,18
Persentase capaian	101,24%	103,42%

Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2022 adalah sebesar 96,18. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 93. Capaian Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dari tahun ke tahun melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan sudah cukup efektif.

SS 8 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

14. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	50%	70%	80%
Realisasi	88%	87,21%	82%
Persentase capaian	176%	124,59%	102,5%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	85%	85%
Realisasi	100%	97,77%
Persentase capaian	117,65%	115,02%

Realisasi Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada tahun 2022 adalah sebesar 97,77%, dari 179 produk persetujuan pengelolaan kekayaan negara yang diterbitkan oleh KPKNL Jakarta I pada Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 telah ditindak lanjuti oleh

satuan kerja sebanyak 175 produk. Pengukuran kinerja IKU ini dapat tercapai dikarenakan KPKNL Jakarta I rutin melakukan pembinaan pada satker melalui sosialisasi dan surat.

SS 9 SDM yang Kompeten

15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	100%	87%	100%
Realisasi	100%	92,50%	120%
Persentase capaian	100%	106,32%	120%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	100%	100%
Realisasi	120%	120%
Persentase capaian	120%	120%

Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2022 adalah sebesar 120%. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai(bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

SS 10 Organisasi yang *fit-for-purpose*

16. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	70	80	70
Realisasi	97,59	91,74	99,33
Persentase capaian	120%	114,68%	114,68%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	75	80
Realisasi	95,43	99,17
Persentase capaian	127,24%	123,96%

Tujuan IKU Nilai hasil review pengelolaan kinerja adalah untuk mengetahui perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 25%
- 2) Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%
- 3) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%
- 4) Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 15%

Aksi yang dilakukan dalam mencapai target IKU yaitu mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja di KPKNL Jakarta I dengan lengkap.

17. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	-	-	80
Realisasi	-	-	97,39
Persentase capaian	-	-	121,74%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	80	90
Realisasi	99,55	99,75
Persentase capaian	124,44%	110,83%

IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai baru diukur di tahun 2020. Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD),

contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Realisasi IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai pada tahun 2022 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 99,75 dari target 90 dengan persentase capaian sebesar 110,83%.

SS 11 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

18. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	95%	95%	95%
Realisasi	98,36%	97,62%	100%
Persentase capaian	103,54%	103,19%	105,26%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	95,5%	95,5%
Realisasi	94,48%	95,28%
Persentase capaian	98,93%	99,77%

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 95,28%. Pencapaian tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 95,5% dikarenakan walaupun penyerapan anggaran KPKNL Jakarta I bagus, namun nilai efisiensi rendah, diakibatkan pagu anggaran yang sangat terbatas.

19. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	-	-	-
Realisasi	-	-	-
Persentase capaian	-	-	-

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	100%
Realisasi	-	159%
Persentase capaian	-	159%

IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan baru diukur di tahun ini. Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. Realisasi Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2022 adalah sebesar 159%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 100%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai kegiatan dilingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dalam Tahun 2022 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022.

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia (PAGU akhir) yaitu sebesar Rp1.575.939.000,00 pada tahun 2022, dapat terealisasi sebesar Rp1.470.673.177,00 dari pagu yang telah ditetapkan.

Target PKPA tahun 2022 sebesar 95,5%, dan dapat terealisasi sebesar 95,28%. Target sebesar 95,5% tidak dapat tercapai dikarenakan PAGU Akhir Tahun 2022 yang kecil sehingga sehingga capaian efisiensi anggaran yang menjadi salah satu komponen dalam formula capaian PKPA menjadi rendah.

C. Capaian Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2022

Pada tahun 2022, KPKNL Jakarta I memiliki target pengembangan kompetensi pegawai sebesar 100%. Target tersebut dapat tercapai sebesar 120%, yang dihitung dari capaian jumlah jam pelatihan yang telah yang dicapai oleh 24 (dua puluh empat) pelaksana pada KPKNL Jakarta I.

BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN serta upaya peningkatan *good governance*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Dalam situasi dan kondisi yang cenderung mulai normal dari adanya pandemi COVID-19, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang dan penilaian semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, jajaran KPKNL Jakarta I senantiasa berusaha menghadapi tantang tersebut, sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IKU secara keseluruhan pada Tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat 1 (satu) IKU yang realisasinya belum mencapai target yang ditentukan.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan KPKNL Jakarta I dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan penggalan potensi penerimaan dari Piutang Negara sehingga outstanding piutang negara dapat ditekan.
2. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif.
3. Meningkatkan kualitas SDM agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengguna jasa.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta I, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kepala Kantor,

Wulan Ahmad Fananto

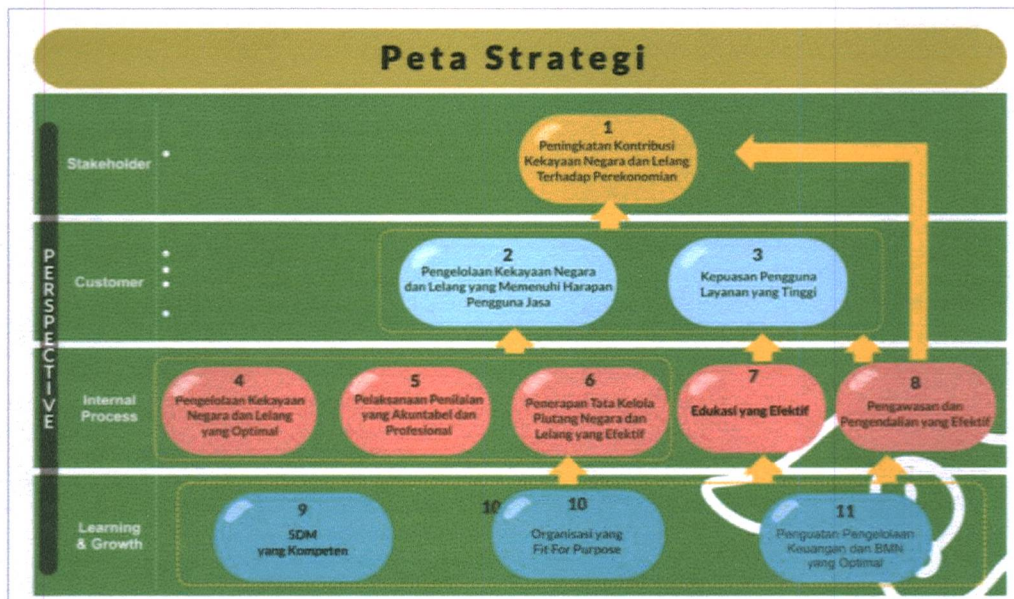


**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7/KN.19/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,65
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan BMN yang optimal	11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Program/ Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 211.507.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 5.035.000
2. Pengelolaan Aset	Rp 206.472.000
Dukungan Manajemen	Rp 1.335.928.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 19.543.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.309.509.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 900.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 5.976.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Aloysius Yanis Dhaniarto

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik
Wildan Ahmad Fananto



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,65	4,65
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	65%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	93	93	-	93	93	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wildan Ahmad Fananto



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wildan Ahmad Fananto

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wildan Ahmad Fananto	NAMA	Aloysius Yanis Dhaniarto
NIP	196705131993031001	NIP	196601261991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta

NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas Lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,65
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%



12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
18	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Jakarta, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wildan Ahmad Fananto
 NIP 196705131993031001



Ditandatangani Secara Elektronik
Aloysius Yanis Dhaniarto
 NIP 196601261991031001



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
154/PMK.01/2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

